

PENOLAKAN TIONGKOK TERKAIT PENGAJUAN KEANGGOTAAN INDIA DALAM NUCLEAR SUPPLIERS GROUP (NSG)

I Made Widhi Sadhana Parama Nanda¹⁾, Putri Ni Wayan Rainy Priadarsini²⁾, Putu Titah Kawitri Resen³⁾

^{1,2,3)}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana
Email: paramananda20111996@gmail.com¹⁾, rainypriadarsini@yahoo.com²⁾
kawitriresen@gmail.com³⁾

ABSTRACT

This research aims to explain why China opposes India's membership in the Nuclear Suppliers Group (NSG) by using explanatory qualitative methods. India's desire to become a member of the NSG is based on India's fulfillment of clean energy and gaining international legitimacy as nuclear weapons countries. The submission of India membership is supported by a majority of NSG members including four countries from the P5 Countries. Although, many countries supported the submission of Indian membership, China decided to oppose, which make China the only P5 Countries that blocks India's membership in the NSG. This research uses the Neorealism framework to answer the reasons behind China's refusal on India's membership in the NSG. The research then found the answer that China's rejection was based on China's efforts to protect its survival from threats from other countries while simultaneously maintaining a strategic balance in the South Asian region.

Keywords: China, India, Neorealism, Nuclear Suppliers Group (NSG)

1. PENDAHULUAN

Penemuan dan pengembangan teknologi nuklir dapat memberikan manfaat sekaligus menimbulkan kekhawatiran, hal ini dikarenakan pengembangan teknologi nuklir dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terutama tenaga listrik sekaligus dapat digunakan sebagai senjata pemusnah massal yang mematikan. Penggunaan teknologi nuklir sebagai senjata pernah dilakukan ketika Amerika Serikat melakukan serangan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, pada Perang Dunia II yang menyebabkan hancurnya seluruh kota dan menewaskan ratusan ribu masyarakat sipil dan militer. Peristiwa tersebut

menjadi titik awal munculnya ketakutan masyarakat internasional akan ancaman nuklir terhadap perdamaian dunia sekaligus mendorong negara-negara untuk mulai menciptakan mekanisme yang dapat mencegah perluasan senjata nuklir (Alagappa, 2008).

Ketakutan akan ancaman nuklir menyebabkan tujuh negara penyuplai nuklir (Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, Kanada, Prancis, dan Rusia) berinisiasi untuk membentuk Kelompok Pemasok Nuklir atau *Nuclear Suppliers Group* (NSG). NSG dibentuk dengan tujuan untuk mengatur kontrol ekspor nuklir di dunia, menetapkan pedoman yang mengatur transfer bahan dan peralatan terkait

nuklir, melakukan transfer nuklir hanya untuk tujuan damai serta memastikan tidak dilakukan untuk kegiatan nuklir yang membahayakan. Negara anggota NSG memiliki hak untuk melakukan ekspor impor material dan teknologi nuklir ke sesama anggota.

Pada tanggal 6 September 2008, NSG memberikan pengecualian bagi India yang bukan merupakan anggota NSG sekaligus membuat India menjadi negara pertama yang tidak menandatangani NPT untuk diperbolehkan melakukan impor atau mengakses bahan dan peralatan terkait nuklir dengan anggota NSG. Pengecualian khusus ini, telah memudahkan India untuk melakukan perdagangan nuklir dengan negara anggota NSG sekaligus mengejar ambisinya untuk mendapatkan keanggotaan di NSG (Mustafa, 2016). Melihat ambisi India untuk mendapat keanggotaan, memunculkan penolakan dari setidaknya sembilan negara anggota terutama Tiongkok. Tiongkok dengan tegas menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap pengajuan keanggotaan yang dilakukan India sejak tahun 2016 hingga tahun 2018. Pengambilan keputusan dalam badan NSG ditentukan atas dasar konsensus anggota (Hibbs, 2011), hal ini membuat Tiongkok memiliki hak untuk memveto pengajuan keanggotaan India berkali-kali.

Penolakan Tiongkok terkait keanggotaan India telah menyebabkan India gagal mendapatkan keanggotaan dalam NSG, meskipun mendapat dukungan yang kuat dari Amerika Serikat dan disetujui oleh hampir mayoritas negara anggota. Walaupun,

Tiongkok bukan merupakan satu-satunya negara yang mengajukan keberatan atas keanggotaan India, tetapi hanya Tiongkok yang secara konsisten mengangkat rintangan prosedural terkait pengajuan keanggotaan India. Selain itu, Tiongkok juga merupakan satu-satunya negara yang termasuk ke dalam *P5 Countries* yang memutuskan untuk memblokir keanggotaan India.

2. KAJIAN PUSTAKA

Penulis menggunakan tiga literatur sebagai kajian pustaka yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian ini. Pertama adalah tulisan dari Dewi Agustini yang membahas mengenai penolakan Prancis terhadap Turki dalam pengajuan keanggotannya ke Uni Eropa. Agustini menjelaskan bahwa penolakan Prancis didasarkan pada kepentingan nasionalnya. Prancis melihat pengajuan keanggotaan Turki ke dalam Uni Eropa akan mengancam kebijakan *Selective Immigration* yang dicanangkan Pemerintah Prancis untuk mengatasi permasalahan imigran dengan mengurangi dan menyeleksi jumlah imigran yang masuk ke Prancis. Tulisan Agustini kemudian menyimpulkan bahwa penolakan suatu negara terhadap pengajuan keanggotaan negara lain dalam organisasi internasional didasarkan atas kepentingan nasionalnya.

Literatur kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah tulisan dari Erik Pratama yang membahas mengenai Kepentingan dari Amerika Serikat dalam upayanya Melakukan Kebijakan *Pivot to Asia* di Asia Timur. Pratama

dalam tulisannya menyebutkan bahwasanya Amerika Serikat pada era Presiden Barack Obama mengubah fokus kebijakan luar negerinya yang sebelumnya memprioritaskan pada Timur Tengah berubah ke Asia Pasifik. Perubahan sikap Amerika Serikat tersebut disebabkan oleh pengaruh sistem internasional, kondisi, dan dinamika yang sedang terjadi di Asia Pasifik. Oleh sebab itu, Pratama dalam penelitiannya kemudian menyimpulkan bahwa segala aktivitas, perilaku, tindakan, kepentingan, dan kebijakan luar negeri yang diambil oleh suatu negara didasarkan oleh pengaruh sistem internasional yang mana hal tersebut sesuai dengan paham Neorealisme.

Literatur terakhir yang digunakan dalam penelitian ini ialah tulisan dari Retno Ajiyastuti yang membahas tentang respon Amerika Serikat terkait kerja sama militer antara Tiongkok dengan Rusia di tahun 2007-2012. Ajiyastuti menyebutkan bahwa Amerika Serikat yang memiliki kepentingan di kawasan Asia Pasifik baik itu ekonomi, politik, dan militer merasa terancam dengan munculnya kehadiran kerja sama militer antara Tiongkok dengan Rusia. Ajiyastuti kemudian menjelaskan bahwa Amerika Serikat dalam merespon permasalahan tersebut, mengeluarkan berbagai langkah termasuk melalui perlindungan dan penguatan aliansinya di kawasan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan asumsi *Balance of Power* dari Palmer *et al.* yang menjelaskan bahwa melalui pembentukan aliansi, tidak akan ada satu kekuatan atau kombinasi kekuatan yang akan dibiarkan untuk tumbuh begitu kuat

hingga dapat mengancam keamanan suatu negara. Oleh sebab itu, Tulisan Ajiyastuti kemudian membantu menjelaskan bahwa negara akan melakukan *Balance of Power* untuk menjaga kestabilan di suatu kawasan serta mencegah munculnya suatu kekuatan baru yang dapat mengancam kelangsungan hidup suatu negara.

NEOREALISME

Neorealisme merupakan perspektif dalam hubungan internasional yang dicetuskan Kenneth Waltz pada tahun 1979. Waltz (1979) berpendapat bahwasanya dunia berada dalam hubungan-hubungan yang sistemik, yang mana segala perilaku, aktivitas, tindakan, dan kebijakan suatu negara dipengaruhi oleh sistem internasional baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak adanya otoritas terpusat di atas negara menyebabkan tidak ada jaminan bahwa suatu negara tidak akan diserang oleh negara lain. Hal inilah yang mendorong negara untuk berupaya mendapatkan *power* guna menjadi lebih kuat dan merasa aman.

Neorealisme kemudian terbagi menjadi dua, yakni Realis Defensif dan Realis Ofensif dikarenakan terdapat ketidaksepakatan di antara para pemikir Realis Strukturalis mengenai seberapa banyak *power* yang harus dikejar oleh suatu negara. Pada penelitian ini, Teori Neorealis menjadi pisau analisis, yang mana juga akan dianalisis melalui kacamata Realis Defensif. Hal ini dikarenakan para tokoh pemikir Realis Defensif seperti Kenneth Waltz (1979) mempercayai pada asumsi bahwa negara-negara dunia akan mengumpulkan *power* sebagai upaya antisipasi dalam

menghadapi ancaman negara lain dan pertahanan ketika konflik terjadi. Asumsi tersebut kemudian menimbulkan suatu tendensi bagi setiap negara untuk mempertahankan *Balance of Power* atau perimbangan kekuasaan guna meminimalisir timbulnya konflik dan mempertahankan perdamaian (Waltz, 1979). Pemikiran Realis Defensif tersebut berbeda dengan paham Realis Ofensif yang mengklaim bahwa *Balance of Power* tidak efektif (Dunne *et al.*, 2013).

Balance of Power berlangsung ketika dua syarat terpenuhi, yakni bahwa tatanan bersifat anarkis dan tatanan tersebut dipenuhi oleh unit-unit yang ingin terus mempertahankan hidupnya. *Balance of Power* dipandang sebagai upaya untuk mencegah munculnya kekuatan baru yang dominan di suatu kawasan mengingat *Balance of Power* memainkan peran kunci dalam Neorealisme. Waltz (1979) berargumen bahwa *Balance of Power* merupakan satu-satunya cara untuk menjaga dan memelihara kestabilan serta perdamaian. Hal inilah yang menyebabkan *Balance of Power* dibutuhkan karena mampu menciptakan kestabilan kawasan dalam sistem internasional ketika munculnya kekuatan baru yang mengancam.

Balance of Power dapat dilakukan dengan menciptakan dan memelihara aliansi dan menyuplai serta memasok kekuatan militer ke negara aliansi (Paul *et al.*, 2004). Pada penelitian ini, Tiongkok menjadikan Pakistan sebagai aliansinya. Hal ini dikarenakan hubungan militer di antara kedua negara akan terus menguat, dikarenakan aliansi Sino-

Pak (Tiongkok dengan Pakistan) terbentuk sebagai upaya untuk melawan pengaruh Indo-AS (India dengan Amerika Serikat) di wilayah Asia Selatan. Ahmad *et al.* (2017) mengutip pernyataan Yang *et al.* (2011) menyatakan bahwa hubungan antara Tiongkok dan Pakistan digambarkan dengan istilah “teman di segala kondisi” atau *all-weather friends*, yang mana kedua negara terus aktif dalam memperkuat keterlibatan satu sama lain untuk mengamankan kepentingan khusus masing-masing baik di dalam dan di luar kawasan.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode eksplanatif dan pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif berupaya untuk menganalisis kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang individu dalam latar alamiah (Martono, 2015).

Pada penelitian ini digunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber baik itu melalui buku, jurnal ilmiah, berita *online*, dan *website*. Adapun contoh sumber buku yang digunakan, yakni buku yang berjudul *The Long Shadow: Nuclear Weapons and Security in 21st Century Asia*, yang mana buku tersebut berkaitan dan bermanfaat bagi penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber yang berasal dari berbagai jurnal ilmiah, berita *online* maupun *website* resmi yang mampu digunakan untuk menganalisis alasan penolakan Tiongkok terhadap upaya keanggotaan yang diajukan oleh India dalam NSG, yang sekaligus juga memiliki keterkaitan

dengan isu-isu nuklir, NSG, dinamika kawasan Asia Selatan, dan sebagainya.

Studi Hubungan Internasional membagi tingkatan analisis menjadi tiga, yakni individu, negara dan sistem internasional (Mas'ood, 1989). Menurut Maso'ed (1989) kerangka berpikir tingkat analisis bertujuan untuk membantu memilah dan memilih faktor-faktor mana yang harus ditekankan dalam sebuah penelitian. Namun, sebelum memilih tingkat analisis, suatu penelitian perlu menetapkan unit analisis dan unit eksplanasi yang digunakan. Unit eksplanasi merupakan objek yang mempengaruhi perilaku unit analisis yang digunakan (variabel independen) (Maso'ed, 1989). Pada penelitian ini unit analisisnya ialah negara, yakni Tiongkok. Sedangkan unit eksplanasinya ialah pengajuan keanggotaan India dalam NSG. Sementara itu, pada tingkat analisis penelitian ini ialah negara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data dari berbagai jenis media dan materi dari kepustakaan seperti buku-buku, jurnal ilmiah, media *online*, dan lain-lain yang sesuai dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1983). Sementara itu penyajian data dalam penelitian ini sekaligus menyajikan beberapa gambar dan grafik dalam bentuk teks naratif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Nuclear Suppliers Group (NSG)

Setelah ledakan uji coba senjata nuklir yang dilakukan India pada tahun 1974, tujuh

negara pemasok nuklir menyadari bahwa NPT belum cukup untuk mencegah penyebaran senjata nuklir sehingga terbentuklah *Nuclear Suppliers Group* (NSG). NSG bertujuan untuk mencegah proliferasi nuklir dengan mengendalikan ekspor bahan, peralatan, dan teknologi yang dapat digunakan untuk memproduksi senjata nuklir. NSG demi memastikan hal tersebut, kemudian merumuskan suatu pedoman yang terdiri dari dua set aturan dalam upaya mengontrol perdagangan nuklir global. Set pertama mengatur mengenai ekspor barang yang secara khusus dirancang dan dipersiapkan untuk penggunaan nuklir, sementara set kedua mengatur mengenai pengidentifikasian terkait *dual-use items* atau barang-barang dengan penggunaan ganda.

Negara-negara yang menjadi anggota dalam NSG akan menerima berbagai manfaat berupa kemudahan dalam melakukan ekspor dan impor bahan nuklir serta akses terhadap teknologi nuklir terbaru. Berbagai manfaat yang didapatkan oleh anggota NSG, menyebabkan beberapa negara tertarik dan berusaha untuk mengajukan keanggotaan dalam NSG seperti, India, Pakistan, Israel, dan Namibia. Namun, mendapatkan keanggotaan dalam NSG bukanlah hal yang mudah. Negara yang akan mengajukan keanggotaan harus memenuhi serangkaian persyaratan prosedural yang telah ditetapkan oleh NSG termasuk meratifikasi perjanjian NPT sekaligus persetujuan dari semua negara anggota mengingat NSG

menggunakan sistem konsensus pada setiap pengambilan keputusan.

4.2. Pengajuan Keanggotaan India dalam NSG

Keberhasilan dalam mendapatkan *clean waiver*, semakin membuat India percaya diri untuk mengejar ambisinya dalam mendapatkan keanggotaan di NSG (Mustafa, 2016). India kemudian secara resmi mengajukan keanggotaannya dalam NSG pada bulan Mei 2016 yang mana kemudian dibahas pada bulan Juni saat *plenary meeting* yang digelar di Seoul, Korea Selatan. Jung (2017) menjelaskan bahwa India percaya berdasarkan perhitungan politik bahwa setidaknya mayoritas negara anggota akan mendukung mosi pengajuan keanggotaannya mengingat India telah aktif melakukan dorongan intensif ke negara-negara anggota lainnya. Namun, oposisi yang dipimpin oleh Tiongkok memutuskan untuk memveto pengajuan keanggotaan India, sehingga hal tersebut memupuskan ambisi India menjadi anggota NSG.

Penolakan Tiongkok terhadap pengajuan keanggotaan India, menyebabkan India berusaha untuk mencari cara agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, India berusaha untuk mengadakan negosiasi langsung dengan pihak Tiongkok demi menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada di antara kedua negara (Jung, 2017). India kembali berusaha mengajukan keanggotaan pada tahun 2017 dan 2018, yang mana masing-masing pengajuan diajukan

ketika *plenary meeting* digelar di Bern, Swiss dan Jurmala, Latvia. Namun, Tiongkok tetap bersikeras pada posisinya semula dengan tetap menolak keanggotaan India atas dasar tidak ditandatanganinya NPT oleh India.

Menanggapi hal tersebut, India merespon dengan menyatakan bahwa tidak perlu bagi suatu negara untuk menandatangani NPT demi menjadi anggota NSG, melainkan suatu negara harusnya dinilai berdasarkan jejak rekam terkait tanggung jawab aktivitas nuklirnya (Dasgupta, 2017). Selain itu, India juga menambahkan bahwa meskipun negara-negara lain juga mengajukan keberatan atas keanggotaan India, tetapi hanya Tiongkok yang secara konsisten mengangkat rintangan prosedural terkait pengajuan keanggotaan India (Jacob, 2018). Ambisi India menjadi anggota NSG didasarkan atas dua jenis alasan yang berbeda. Alasan pertama ialah aspirasi India pada program nuklir sipilnya untuk pemenuhan kebutuhan terhadap energi bersih. Alasan kedua India ialah upaya untuk memperoleh status internasional yang lebih besar, termasuk status nuklir (Hibbs, 2018). Hibbs (2018) juga menjelaskan bahwa dengan bergabung menjadi anggota NSG, India akan memiliki hak dan kewenangan untuk berpartisipasi di dalam *rule making* atau pembuatan peraturan dan kebijakan terkait perdagangan nuklir.

4.3. Penolakan Tiongkok Terkait Pengajuan Keanggotaan India

Ketika India mengajukan keanggotaan dalam NSG secara resmi pada *plenary meeting* yang digelar pada bulan Juni 2016 di Seoul,

Korea Selatan, Tiongkok secara terbuka menyatakan keberatannya, bahkan menurut Tiongkok pengajuan keanggotaan India seharusnya tidak ada dalam agenda pertemuan. Penolakan Tiongkok tersebut didasarkan pada keinginan Tiongkok untuk tidak akan membengkokkan atau tidak mentaati peraturan dengan mengizinkan India menjadi anggota NSG (Pearson, 2016).

Tiongkok berpendapat bahwa dengan memberikan India keanggotaan dalam NSG akan merusak usaha-usaha internasional dalam mencegah proliferasi selama ini (Rosseau, 2016). Keputusan Tiongkok untuk menolak mosi keanggotaan India pada *plenary meeting* di Seoul, membuat India gagal mewujudkan ambisinya untuk menjadi anggota NSG. Namun, kegagalan India pada pertemuan di Seoul tidak menyurutkan ambisi India untuk mencoba melakukan negosiasi dengan pihak Tiongkok (Jung, 2017). Hal ini kemudian diwujudkan dalam pertemuan yang dilakukan antara kedua negara pada bulan September 2016 di New Delhi, India. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Delegasi Tiongkok yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Wang Qun dari Kementerian Luar Negeri dan Delegasi India yang dipimpin oleh Amandeep Singh Gill, Sekretariat Gabungan (Perlucutan Senjata dan Keamanan Internasional). Pada pertemuan tersebut, Tiongkok menyatakan bahwa Tiongkok mendukung gagasan tentang *two-step approach* atau dua langkah pendekatan untuk mengatasi permasalahan terkait partisipasi negara-negara non-NPT, termasuk India.

Menurut *Sputnik International* (2016) pernyataan Tiongkok tersebut berarti Tiongkok memberikan dua opsi bagi India jika ingin bergabung dengan NSG. Opsi pertama adalah dengan menandatangani NPT yang mana membuat India menyerahkan seluruh persenjataan nuklirnya dan opsi kedua dengan membentuk seperangkat aturan untuk semua negara non-NPT. Kedua opsi yang diberikan Tiongkok membuat keanggotaan dalam NSG adalah hal yang mustahil bagi India. Hal ini mengingat India tidak akan meratifikasi NPT, karena dengan menandatangani perjanjian tersebut berarti menyerahkan atau melucuti seluruh persenjataan nuklir India yang mana India akhirnya tidak akan bisa melindungi dirinya dari ancaman dan serangan negara-negara tetangga (Roche, 2016). Sementara itu, ketika India memilih menggunakan opsi kedua, negara non-NPT lainnya akan mendapat keanggotaan dalam NSG, terutama Pakistan yang juga telah mengajukan keanggotaan dalam NSG. Hal ini akan mempermalukan India secara politis, mengingat Pemerintah India telah mengklaim secara diplomatik mengisolasi Pakistan karena menyembunyikan kelompok-kelompok teroris (Sputnik Internasional, 2016).

Tiongkok melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying menegaskan posisi Tiongkok tidak akan berubah dan tetap pada posisinya terkait *two-step approach*. Tiongkok dengan jelas dan tegas menyuarakan pertentangannya dan akan terus mengisyaratkan untuk memblokir pengajuan India sebagai anggota NSG (Firstpost, 2016). Tiongkok konsisten berpegang teguh untuk

mengangkat isu prosedural terkait upayanya untuk menolak keanggotaan India. Keteguhan pendirian Tiongkok terhadap India, telah menyebabkan India hingga tahun 2018 belum juga berhasil mendapatkan keanggotaannya dalam NSG.

4.4. Alasan Penolakan Tiongkok

Keputusan Tiongkok untuk memblokir keanggotaan India dalam NSG dikarenakan India tidak menandatangani NPT telah menyebabkan India gagal mewujudkan ambisinya untuk menjadi anggota dalam kelompok nuklir elit tersebut. Tiongkok merupakan negara yang secara konsisten terus mengangkat rintangan prosedural pada pengajuan India. Selain itu, Tiongkok menjadi satu-satunya negara *P5 Countries* sekaligus *nuclear weapons countries* yang menolak keinginan India menjadi anggota dalam NSG. Peneliti kemudian menemukan alasan-alasan apa yang melatarbelakangi keputusan Tiongkok untuk menolak pengajuan keanggotaan India dalam NSG berdasarkan Perspektif Neorealisme.

A. Aliansi Indo-AS sebagai Ancaman bagi Tiongkok

Terbentuknya aliansi Indo-AS yang mendasari berbagai kerja sama terutama kesepakatan nuklir di antara kedua negara membuat Tiongkok merasa khawatir terhadap hubungan di antara kedua negara tersebut (Haider, 2016). Ketakutan Tiongkok terhadap aliansi di antara kedua negara tersebut memang bukan tanpa alasan. Perjanjian nuklir sipil yang terjalin antara Indo-AS dianggap

sebagai upaya pembendungan oleh Tiongkok, mengingat perjanjian tersebut didasari atas tiga tujuan, yaitu: untuk memperkuat hubungan strategis yang dimotivasi oleh kebangkitan Tiongkok, untuk meningkatkan kerja sama ekonomi berdasarkan pembangunan ekonomi India, dan untuk meningkatkan kerja sama dalam hal mencegah proliferasi (Jung, 2017).

Selain itu, kerja sama nuklir sipil Indo-AS terlaksana dalam tiga kondisi, yaitu: India berjanji untuk mematuhi persyaratan dengan memisahkan fasilitas nuklir militer dengan sipilnya di bawah perlindungan IAEA, konsensus mengenai kesepakatan dari negara anggota NSG, dan dokumentasi komitmen Amerika Serikat dalam rezim NPT (Boese, 2008). India yang memutuskan untuk menyetujui tiga kondisi tersebut, meminta timbal balik berupa penawaran untuk mendapatkan *clean waiver* dari NSG, yang mana disambut baik oleh pihak Amerika Serikat (Jung, 2017) dan akhirnya disetujui oleh negara-negara anggota NSG pada tahun 2008 berkat dukungan dan lobi-lobi politik yang besar dari Amerika Serikat. Sejak saat itu, India telah mencoba untuk memanfaatkan keberhasilan kesepakatan nuklir Indo-AS untuk lebih memperluas akomodasinya dalam tatanan nuklir global berbasis NPT, termasuk keanggotaan dalam NSG (Jung, 2017).

Melihat kedekatan Indo-AS yang makin menguat dan terus aktif dalam bekerja sama membuat Tiongkok merasa khawatir terhadap kesepakatan nuklir di antara kedua negara tersebut (Haider, 2016). Tiongkok menyebut strategi kedua negara tersebut sebagai upaya

untuk mengelilingi dan membendung pengaruh dan kekuatan Tiongkok (Ahmad et al., 2017). Hal tersebut juga merujuk pada pandangan Amerika Serikat terhadap India sebagai mitra strategis untuk mengekang pengaruh angkatan laut Tiongkok yang semakin meningkat di kawasan Asia Pasifik dengan menjadikan India sebagai landasan kerja sama militer di masa depan (Abi-Habib, 2018). Tidak adanya jaminan bahwa aliansi Indo-AS tidak akan mengancam keberlangsungan posisi strategis Tiongkok di Asia Selatan, membuat Tiongkok merasa berkepentingan untuk bertindak dengan konsisten untuk memveto pengajuan keanggotaan India dalam NSG. Hal ini kemudian sesuai dengan tulisan Pratama (2016) yang menjelaskan bahwasanya dalam paham Neorealisme, sistem internasional yang anarki menyebabkan tidak ada jaminan bahwa satu negara tidak akan diserang oleh negara lain. Asumsi tersebut kemudian menyebabkan negara harus bertindak demi melindungi dirinya dari ancaman negara lain.

Tiongkok yang mengetahui bahwa niatan aliansi Indo-AS tidak dapat diyakini tidak akan mengancam keberlangsungan Tiongkok. Oleh sebab itu, Tiongkok merespon hal tersebut dengan menolak pengajuan keanggotaan India berkali-kali dalam NSG. Hal ini mengingat pada akhirnya Tiongkok memandang aliansi Indo-AS sebagai ancaman terhadap keberlangsungan Tiongkok (Naseer et al., 2015). Selain itu, menurut Mourdoukoutas (2016) alasan Tiongkok memveto keanggotaan India dalam NSG juga dinilai sebagai upaya Tiongkok untuk menghukum India karena terus berhubungan

semakin dekat dengan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Tiongkok menilai bahwa dukungan Amerika Serikat yang besar terhadap ambisi India untuk menjadi anggota klub elit NSG didasari atas kepentingan Amerika Serikat untuk menahan kebangkitan kekuatan Tiongkok. Oleh karenanya, penting bagi Tiongkok untuk memainkan perannya dalam NSG dengan terus menggunakan hak vetonya untuk menolak akses India mengingat Tiongkok menilai hubungan Indo-AS sebagai ancaman terhadap Tiongkok. Hal ini juga sesuai dengan Neorealisme yang menjelaskan bahwa negara merupakan aktor rasional, yang akan mengeluarkan strategi yang baik untuk memaksimalkan peluangnya untuk bertahan hidup (Dunne et al., 2013) termasuk perihal tindakan Tiongkok yang memutuskan menolak keanggotaan India dalam NSG.

B. Pengaruh *All Weather Friends* Sino-Pak terhadap Penolakan Keanggotaan India

Ketika India tumbuh menjadi pemain yang lebih kuat dalam hierarki global dengan memperkuat hubungannya dengan Amerika Serikat, membuat Tiongkok menafsirkan bahwa kepentingan terbaiknya adalah dengan terus memperkuat hubungannya dengan Pakistan demi menahan upaya pembendungan dari Aliansi Indo-AS (Rousseau, 2014). Namun, hubungan Sino-Pak (Tiongkok dengan Pakistan) sebenarnya telah sejak lama terjalin, yang mana mencapai momentum nyata setelah Perang Sino-India (Tiongkok dengan India) tahun 1962. Persahabatan di antara kedua negara sering dianggap dengan istilah *Iron*

brotherhood (Shih, 2018). Namun, barangkali istilah “teman di segala kondisi” atau *all-weather friends*, merupakan istilah yang paling sering digunakan untuk menggambarkan kedekatan di antara kedua negara. Ahmad *et al.* (2017) yang mengutip pernyataan Yang *et al.* (2011) menjelaskan bahwa istilah *all weather friends* digunakan untuk menggambarkan hubungan Sino-Pak karena kedua negara terus memperkuat keterlibatan satu sama lain untuk mengamankan kepentingan khusus masing-masing baik di dalam dan di luar kawasan.

Sino-Pak telah terlibat dalam berbagai kegiatan bersama yang menguntungkan secara politik, strategis, ekonomi, militer, dan pertahanan. Menjaga hubungan dekat dengan Tiongkok merupakan perihal prioritas bagi Pakistan (Rosseau, 2014). Sebagai imbalan atas kedekatan dengan Tiongkok, Pakistan memperoleh keuntungan dari penyediaan berbagai bantuan ekonomi, militer, dan teknis yang ekstensif dari Tiongkok selama bertahun-tahun (Rosseau, 2014). Sebaliknya, Tiongkok memiliki ketertarikan pada posisi strategis Pakistan. Pelabuhan Gwadar di Pakistan dapat bermanfaat sebagai tempat untuk patroli angkatan laut gabungan Sino-Pak di Samudera Hindia, yang semakin meningkatkan jangkauan angkatan laut Tiongkok. Pelabuhan Gwadar akan meningkatkan pergerakan angkatan laut kedua negara sekaligus semakin memperluas kerja sama pertahanan, khususnya di bidang angkatan laut.

Selain itu, keterlibatan aktif Tiongkok mulai dari pengembangan dan pembangunan reaktor nuklir telah membantu Pakistan dalam

upaya menstabilkan ekonomi sekaligus memperkuat pertahanan negara. Tiongkok dan Pakistan juga telah menandatangani sejumlah perjanjian militer dan pertahanan yang diharapkan dapat menguntungkan bagi kedua negara (Ahmad *et al.*, 2017). Hubungan militer antara Tiongkok dan Pakistan akan terus menguat mengingat aliansi kedua negara didasarkan pada aliansi geopolitik, yang ditujukan untuk melawan pengaruh Indo-AS di wilayah Asia Selatan.

Aliansi Sino-Pak juga telah diwujudkan dengan berbagai kerja sama di bidang militer. Tiongkok sejak beberapa tahun terakhir, telah terbukti menjadi pemasok senjata terbesar ke Pakistan mengalahkan Amerika Serikat yang memutuskan untuk lebih mendekatkan hubungannya dengan India daripada Pakistan (Stacey, 2018). Tiongkok juga telah secara aktif berbagi terhadap pengembangan infrastruktur nuklir Pakistan dan membantu Pakistan memperoleh peralatan dan teknologi nuklir.

Program senjata nuklir Pakistan sangat tergantung pada Tiongkok mengingat Pakistan tidak meratifikasi NPT sehingga menyulitkan Pakistan untuk dapat mengakses berbagai peralatan, bahan, dan teknologi terkait nuklir (Rosseau, 2014). Berdasarkan laporan Kongres Amerika Serikat yang diterbitkan pada bulan Agustus 2006 terungkap bahwa Tiongkok telah melakukan pelanggaran terhadap pedoman NSG melalui penjualan reaktor nuklir ke Pakistan (Rosseau, 2018). Hal tersebut kemudian dapat dipahami bahwa demi membantu program nuklir Pakistan, Tiongkok berani melanggar berbagai perjanjian

internasional termasuk pedoman NSG yang melarang suatu negara untuk mengekspor bahan dan peralatan nuklir ke negara lain dengan tujuan untuk pembuatan senjata nuklir.

Keputusan Tiongkok untuk melakukan proliferasi ke Pakistan bukanlah tanpa alasan. Menurut Robert Ross, Tiongkok yang melakukan proliferasi ke Pakistan dengan memasok teknologi nuklir dan rudal, memandang Pakistan sebagai penangkal yang kredibel sekaligus paling efektif untuk menjamin keamanan sekutu satu-satunya di Asia Selatan terhadap kekuatan India. Argumen tersebut juga didukung oleh pernyataan Paul (2009) yang menyebutkan bahwa melalui proliferasi ke Pakistan, Tiongkok ingin membatasi kemampuan kekuatan India hanya di Asia Selatan dan dengan demikian akan membendung India untuk menjadi kekuatan utama di Asia.

Asia Selatan merupakan kawasan yang menjadi persaingan strategis dan rivalitas antara Tiongkok dengan Amerika Serikat. Munculnya India sebagai aliansi Amerika Serikat membuat Tiongkok menyadari Pakistan merupakan mitra penting dalam upaya mengatasi ancaman dari aliansi Indo-AS (Rousseau, 2014). Selain itu, Tiongkok menyadari bahwa keamanan di kawasan Asia Selatan selalu ditandai oleh persaingan tradisional antara Pakistan dan India (Khan, 2013). Bangkitnya salah satu dari kedua negara tersebut sebagai kekuatan regional akan menyebabkan destabilisasi di kawasan tersebut. Oleh sebab itu, penting bagi Tiongkok untuk memastikan konflik dan perlombaan

senjata yang intens antara India dan Pakistan tetap ada, mengingat India akan terus dikurung dengan saingan regionalnya yang lebih kecil, yakni Pakistan dan bukan dengan Tiongkok (Paul, 2009). Hal inilah yang kemudian sesuai terhadap pemikiran Realis Defensif yang menyebutkan bahwa negara dalam upaya menghindari ancaman dari negara lain akan menimbulkan suatu tendensi bagi setiap negara untuk mempertahankan *Balance of Power* atau perimbangan kekuasaan guna mengurangi timbulnya konflik dan mempertahankan perdamaian (Waltz, 1979).

Namun, kesepakatan nuklir Indo-AS dan *clean waiver* yang diberikan kepada India dalam NSG dinilai telah memungkinkan India untuk mengakses material nuklir yang dapat mengganggu stabilitas strategis di kawasan Asia Selatan. Selain itu, mengetahui ambisi India untuk mendapatkan keanggotaan dalam kelompok elit NSG, membuat Pakistan tidak mau ketinggalan untuk mendapatkan keanggotaan dalam NSG. Berbanding terbalik dengan India yang hampir didukung oleh mayoritas negara anggota NSG, Pakistan hanya didukung oleh beberapa negara terutama Tiongkok. Tiongkok yang merupakan sekutu lama Pakistan, melihat bahwa pengajuan Pakistan menjadi anggota NSG tidak hanya sebatas mendapatkan kesetaraan dengan India tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan Pakistan akan energi yang terus meningkat. Hal ini senada dengan tulisan Ajiyastuti (2014) yang mengutip pernyataan Waltz (1979) yang menyebutkan bahwa negara akan melakukan berbagai langkah untuk melindungi aliansinya

(dalam hal ini, Pakistan), mengingat *Balance of Power* penting ada untuk menjaga kestabilan di suatu kawasan sekaligus mencegah kemunculan suatu kekuatan baru yang dinilai dapat mengancam.

Menyadari bahwa India semakin dekat untuk mendapatkan keanggotaan dalam NSG karena India telah mengumpulkan dukungan dari mayoritas negara anggota dan juga Amerika Serikat yang telah menjadikan India sebagai aliansi sekaligus *major defence partner* atau mitra pertahanan utama, membuat Tiongkok berkepentingan untuk segera bertindak (Varma, 2016). Tiongkok dengan tegas menolak keanggotaan yang diajukan India ke NSG sejak secara resmi mengajukannya pada tahun 2016 sampai tahun 2018. Tiongkok memahami bahwa ambisi India untuk meraih keanggotaan dalam NSG didasarkan atas keinginan India untuk mengungguli kemampuan dan kapabilitas nuklir Pakistan (Varma, 2016). Selain itu, dengan menjadi klub nuklir elit tersebut, India akan mendapatkan legitimasi dari dunia internasional sebagai *nuclear weapon countries* dan memperoleh kekuasaan yang lebih untuk turut andil dalam mengatur kebijakan perdagangan nuklir dunia sekaligus hak untuk menggunakan *veto power* (Jung, 2017).

Memiliki *veto power* akan membuat India mempunyai kekuasaan untuk menolak pengajuan keanggotaan negara lain, termasuk rival abadinya Pakistan. Apabila India akhirnya berhasil mendapatkan keanggotaannya, dipastikan India akan memveto pengajuan keanggotaan Pakistan ke dalam grup nuklir

tersebut (Aqdas, 2018). Hal ini akan menyebabkan kesenjangan kemampuan nuklir antara Pakistan dan India akan semakin besar. Menurut Fu Xiaoqiang yang dikutip melalui Varma (2016) Tiongkok memandang hal tersebut tidak hanya mengganggu *Balance of Power* di Asia Selatan, melainkan juga akan berdampak pada keamanan dan stabilitas di seluruh kawasan Asia Pasifik yang mana pada akhirnya juga akan membahayakan kepentingan nasional Tiongkok.

Penolakan Tiongkok dinilai sebagai taktik yang efektif untuk menunda India untuk meraih ambisinya sebagai anggota NSG (Aqdas, 2018). Dengan menjauhkan India dari ambisinya, Tiongkok akan menjamin perlindungan terhadap *all weather friend*-nya, Pakistan. Perlindungan terhadap Pakistan akan memastikan keseimbangan di Asia Selatan akan tetap terjaga. Hal tersebut dilakukan Tiongkok semata-mata tidak hanya sebatas untuk menjaga stabilitas strategis kawasan dan melindungi kepentingan aliansinya, tetapi juga untuk melindungi kepentingan geopolitik Tiongkok, yang mana berkaitan satu sama lain. Pernyataan tersebut kemudian sesuai dengan asumsi yang menyebutkan bahwa penting melakukan perlindungan terhadap aliansi, mengingat aliansi dinilai mampu menjaga *Balance of Power* dalam suatu kawasan (Walt, 1985).

5. SIMPULAN

Penelitian ini melihat bahwa Tiongkok yang memutuskan untuk menolak setiap pengajuan keanggotaan yang diajukan India dalam NSG

sebagai tindakan Tiongkok untuk melindungi keberlangsungannya dari ancaman aliansi Indo-AS. Hal ini mengingatkan, aliansi Indo-AS dinilai sebagai upaya untuk membendung pengaruh dan kekuatan Tiongkok. Selain itu, penolakan Tiongkok juga didasari atas upayanya dalam menjaga *Balance of Power* di kawasan Asia Selatan dengan melakukan perlindungan terhadap aliansinya, yaitu Pakistan. Oleh karenanya, penting bagi Tiongkok untuk bertindak dengan memblokir keanggotaan India demi melindungi Pakistan sekaligus memastikan keseimbangan strategis di kawasan Asia Selatan tetap terjaga mengingat keanggotaan India dalam NSG akan menciptakan kesenjangan kemampuan nuklir antara Pakistan dan India yang akan mengganggu keseimbangan strategis di Asia Selatan.

Apabila keseimbangan di Asia Selatan terganggu, pada akhirnya akan berdampak terhadap keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut yang sekaligus akan membahayakan keberlangsungan Tiongkok. Sehingga berdasarkan hasil dari temuan dan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan dan sikap yang dilakukan oleh negara termasuk penolakan suatu negara terhadap pengajuan keanggotaan negara lain dalam suatu organisasi internasional didasarkan atas upaya untuk melindungi dirinya dalam sistem internasional. Hal ini kemudian berhasil membuktikan bahwasanya pemikiran Neo Realisme masih relevan digunakan untuk menganalisis berbagai fenomena internasional di tengah begitu banyaknya teori-teori lain

dalam kajian ilmu Hubungan Internasional, termasuk dalam menganalisis fenomena mengenai penolakan Tiongkok terkait pengajuan keanggotaan India dalam kelompok elit pemasok nuklir, NSG.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alagappa, Muthiah. 2008. *The Long Shadow: Nuclear Weapons and Security in 21st Century Asia*. Stanford: Stanford University Press.
- Dunne, Tim, Milja Kurki, dan Steve Smith. 2013. *International Relations Theories Discipline and Diversity*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Martono, N. 2015. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci, Divisi Buku perguruan Tinggi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mas'ood, Mohtar. 1989. *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gajah Mada.
- Paul, T.V., James J. Writz, dan Michael Fortman. 2004. *Balance of Power Theory and Practice in 21th Century*. Stanford: Stanford University Press.
- Walt, Stephen M. 1985. *Alliance Formation and the Balance of World Power*. The MIT Press.
- Waltz, Kenneth N. 1979. *Theory of International Politics*. Berkeley: AddisonWesley Publishing Company.

Berita Online dan Website Resmi

- Ahmad, Parvaiz dan Singh, Bawa. 2017. *Sino-Pakistan Friendship, Changing South Asian Geopolitics And India's post-Obama Options*. Diunduh pada URL: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10262728017700184> [Diakses pada 11 April 2019].
- Aqdas, Hareem. 2018. *Why Pakistan is being Discriminated for Granting Membership of NSG*. Diunduh pada URL: <https://dailymtimes.com.pk/289915/why-pakistan-is-being-discriminated-for-granting-membership-of-nsg/> [Diakses pada 27 Agustus 2019].
- Boese, W. 2008. *NSG, Congress Approve Nuclear Trade with India*. Diunduh pada URL: https://www.armscontrol.org/act/2008_10/NSGapprove [Diakses pada 20 Agustus 2019].
- Dasgupta, Saibal. 2017. *China Signals it Plans to Block India's NSG Bid Once More*. Diunduh pada URL: <https://timesofindia.indiatimes.com/india/china-signals-it-plans-to-block-indias-nsg-bid-once-more/articleshow/58794213.cms> [Diakses pada 11 Juli 2019].
- Firstpost. 2016. *Why India wants to be in the NSG: 10 things you need to know*. Diunduh pada URL: <https://www.firstpost.com/world/why-india-wants-to-be-in-the-nsg-10-things-you-need-to-know-2852272.html> [Diakses pada 15 Maret 2019].
- Haider, Suhasini. 2015. *India Pushes for NSG Membership*. Diunduh pada URL: <http://www.thehindu.com/news/national/india-pushes-for-nsg-membership/article7834737.ece> [Diakses pada 27 Juli 2019].
- Hibbs, Mark. 2011. *The Future of The Nuclear Suppliers Group*. Diunduh pada URL: https://carnegieendowment.org/files/future_nsg.pdf [Diakses pada 22 Februari 2019].
- Mourdoukoutas, Panos. 2016. *The Real Reason China Won't Let India Join NSG*. Diunduh pada URL: <https://www.forbes.com/sites/panosmourdoukoutas/2016/06/30/the-real-reason-china-wont-let-india-join-nsg/#5a661ca85ae5> [Diakses pada 13 Juli 2019].
- Pearson, James. 2016. *China Rejects Bending Rule for India to Join Nuclear Club*. Diunduh pada URL: <https://www.reuters.com/article/us-india-nuclear-china-idUSKCN0ZA01F> [Diakses pada 12 Juli 2019].
- Roche, Elizabeth. 2016. *Why an NSG Membership is Important to India*. Diunduh pada URL: <https://www.livemint.com/Politics/Gglv7xn2DuFpDbmGTcGpK/Why-a-NSG-membership-is-important-to-India.html> [Diakses pada 11 Juli 2019].
- Rosseau, Richard. 2014. *How China and Pakistan Shift The Balance of Power in South Asia*. Diunduh pada URL: <https://www.diplomaticourier.com/posts/h>

- ow-china-and-pakistan-shift-the-balance-of-power-in-south-asia [Diakses pada 26 Agustus 2019].
- Sputnik International. 2016. *India Fails to Get Chinese Support on NSG Membership Bid*. Diunduh pada URL: <https://sputniknews.com/asia/201611181047571158-india-china-nsg/> [Diakses pada 15 Juli 2019].
- Stacey, Kiran. 2018. *Pakistan Shuns US for Chinese High-tech Weapons*. Diunduh pada URL: <https://www.ft.com/content/8dbce0a0-3713-11e8-8b98-2f31af407cc8> [Diakses pada 26 Agustus 2019].
- Varma, K. J. M. 2016. *The Reason China Opposes India's NSG Bid*. Diunduh pada URL: <https://www.rediff.com/news/report/china-could-support-indias-nsg-bid-if/20160616.htm> [Diakses pada 27 Agustus 2019].
- Jung, Ji Yeon. 2017. *A Path to NSG: India's Rise in the Global Nuclear Order*. Diunduh pada URL: https://www.orfonline.org/wp-content/uploads/2017/12/ORF_Occasional_Paper_129_Nuclear.pdf [Diakses pada 10 Juli 2019].
- Naseer, Rizwan dan Amin, Musarat .2015. *Sino-Pakistan Maneuvering to Balance the Power in South Asia*. South Asian Studies.
- Paul, T.V. 2009. *Chinese-Pakistani Nuclear/Missile Ties and Balance of Power Politics*. Diunduh pada URL: <http://www.tvpaul.com/files/Paul%282003%29.pdf>. [Diakses pada 20 Juli 2019].